

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis. Aspek yuridis didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selanjutnya aspek filosofis didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang menjadi pertimbangan bahwa terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa egrek. Akan tetapi, dasar pertimbangan hakim secara yuridis masih kurang tepat karena hakim hanya mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa adalah egrek, dimana egrek ini adalah alat pertanian yang diperbolehkan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terjadi konflik norma, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sehingga penerapan saksi pidana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, kepemilikan, senjata tajam

ABSTRACT

The aims of this research are: 1) to determine and analyze the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of the crime of possession of sharp weapons in decision number: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb; and 2) to find out and analyze the application of punishment to perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in decisions based on statutory regulations. The type of research is normative juridical. The results of the research show that the judge's basic considerations in handing down decisions against perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in decision number: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb are based on juridical and philosophical aspects. The juridical aspect is based on the fact that the defendant in decision number: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb has fulfilled the elements of the crime of possession of a sharp weapon which violates Article 2 paragraph 1 of Emergency Law Number 12 of 1951. Furthermore, the philosophical aspect is based on witness testimony - witnesses and evidence which are taken into consideration that the defendant is guilty of possessing a sharp weapon in the form of an egrek. However, the judge's legal considerations were still not correct because the judge only referred to Article 2 paragraph 1 of the Emergency Law Number 12 of 1951, while the sharp weapon owned by the defendant was an egrek, where this egrek is an agricultural tool that is permitted according to Article 2 paragraph 2 of Emergency Law Number 12 of 1951. The application of punishment to perpetrators of the crime of possessing sharp weapons in decision number: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb there is a conflict of norms, where the decision is contrary to the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, so that the application of criminal witnesses in this decision is not in accordance with the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951.

Keywords: judge's consideration, ownership, sharp weapons